

## Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang

### *The Role of the Fisheries Service in the Economic Empowerment of the Fisherman's Community Coastal in the District of Deli Serdang*

Frans Rosaveld Hamonangan Nainggolan, Budi Hartono & Adam\*

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana,  
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 09 Agustus 2022; Direview: 01 Oktober 2022; Disetujui: 23 Desember 2022

\*Corresponding Email: [adam@staff.uma.ac.id](mailto:adam@staff.uma.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ilmiah dari peran dan faktor yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada proses deskriptif-analisis. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengacu pada teori Sondang P. Siagian yaitu Peran Pemerintah dalam pembangunan sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, tetapi belum memberikan hasil optimal. Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan antara lain kurangnya jumlah keahlian dan kompetensi aparatur di Dinas Perikanan dalam pembinaan dan pendampingan, rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perikanan, kemampuan manajerial/pengelolaan kelompok yang rendah, kesadaran dan niat berusaha masih sangat rendah serta keterbatasan anggaran. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan Dinas Perikanan perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keahlian dan kemampuan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kesempatan berusaha. Dinas Perikanan sebaiknya lebih berperan dalam pembinaan dan pendampingan dalam hal manajerial/pengelolaan administrasi dan sarana perikanan kelompok, serta lebih selektif dalam perencanaan program bantuan kepada nelayan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mendasar yang paling dibutuhkan oleh nelayan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pemberdayaan; Masyarakat Nelayan.

#### Abstract

*This study aims to disclose or scientifically analyze the role and constraint factors faced by the Department of Fisheries in the economic empowerment of coastal fishing communities in Deli Serdang Regency. The research method used is the descriptive method, with a qualitative descriptive analysis technique that focuses on the process, and description of the analysis. Data collection was obtained from observation, interviews, and documentation. The research results refer to the theory of Sondang P. Siagian, namely the role of the government in development as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer and self-executor. The Deli Serdang Regency Fisheries Service has conducted its role in the economic empowerment of coastal fishing communities but has not provided optimal results. Obstacles faced by the Fisheries Service include the lack of number, expertise, and competence of the apparatus in the Fisheries Service in coaching and mentoring, Low participation of fishing communities in participating in training activities conducted by the Fisheries Service, Low managerial / group management abilities, Awareness, and business intention is still low. exceptionally low and budget constraints. Recommendations in this study are expected that the Fisheries Service needs to socialize the importance of expertise and ability to be able to increase competence and business opportunities, the Fisheries Service should play a more role in fostering and assisting in managerial/administrative management and group fishery facilities assets, as well as being more selective in program planning assistance to fishermen based on the priority scale of the basic needs most needed by fishermen.*

**Keywords:** Government's Role; Empowerment; Fishing Society.

**How to Cite:** Nainggolan, F.R.H. Hartono, B. & Adam. (2023). Peran dinas Perikanan dalam pemberdayaan Ekonomi masyarakat Nelayan pesisir Di kabupaten Deli Serdang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 1881-1893



## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur (Ali, 2006; Mahadiansar, Ikhsan, Sentanu, & Asparyana, 2020). Pembangunan memiliki paradigma berkelanjutan dalam perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan (Harmawati, 2018). Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap perekonomian masyarakat, karena perekonomian masyarakat merupakan penopang terbesar pembangunan ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kusumaningrum, 2019). Pemerintahan negara tidak dapat berlangsung tanpa adanya kontribusi dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Semakin baik kemampuan ekonomi rakyat maka pendapatan pajak negara juga akan semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan (Korniawan, 2019).

Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dari luas daratan. Luas wilayah lautan Indonesia sebesar 3.273.810 km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah daratan 1.919.440 km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki panjang garis pantai terbesar kedua di dunia setelah Kanada, yakni sepanjang 108.000 km. Data Gazeter tahun 2020 mencatat jumlah pulau di Indonesia sebanyak 16.771 pulau. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati sangat besar, yang bila dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menambah sumber pendapatan bagi Negara ("Temu Nasional Penerbitan Gazeter Nasional Tahun 2020," 2020).

Tetapi kenyataannya tingkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah pesisir yang mayoritas nelayan, terutama yang jauh dari kota besar masih tergolong lemah (Rukin, 2020). Sebagian besar masyarakat di daerah pesisir memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak dapat dikatakan sejahtera. Bahkan terdapat masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mampu (Zebua, Wildani, Lasefa, & Rahmad, 2016). Dengan kondisi demikian, masyarakat akan kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Disamping itu, kebutuhan pendidikan anak juga tentu menjadi tidak terpenuhi, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup anak bangsa pada generasi yang akan datang (Hasmori, 2011). Artinya, kemiskinan tidak saja berdampak pada kehidupan masyarakat pada saat ini, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat di masa yang akan datang (Suliswanto, 2010).

Hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah. Pemerintah harus berperan lebih aktif memberdayakan perekonomian masyarakat, karena pemerintah memiliki fungsi pembangunan, perlindungan dan fungsi pelayanan masyarakat (Kartasasmita, 2012). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengamanahkan daerah kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat (Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan keterampilan dan potensi suatu masyarakat sehingga dapat memaksimalkan identitas, harkat dan nilai-nilainya untuk bertahan dan berkembang secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Mardikanto & Soebiato, 2013). Pemberdayaan memfasilitasi proses perubahan sosial, memungkinkan kelompok-kelompok yang tidak berdaya dan terpinggirkan untuk memberikan pengaruh politik yang lebih besar di tingkat lokal, regional dan nasional (Adi, 2012; Suharto, 2011). Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan menjadikan mereka lebih mandiri dan berdaya dalam segala aspek kehidupannya, yaitu dengan mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri (Sulistiyani, 2012; Sumodiningrat, 2013). Memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing akan berdampak baik terhadap kemandirian masyarakat suatu daerah, yang berarti mengurangi ketergantungan daerah ke pusat (Sumaryadi, 2005).

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kebaikan bersama. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam memfasilitasi upaya masyarakat untuk menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah,



menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan memberikan bimbingan teknis operasional (Habib, 2021; Noor, 2011). Bimbingan teknis dan pendirian usaha memudahkan masyarakat setempat untuk belajar bagaimana menjalankan usaha (Riyadi & Bratakusumah, 2004; Umar & Jaya, 2022).

Dinas Perikanan adalah instansi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menangani pembangunan terkait dengan sektor perikanan. Dinas ini memiliki peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan di sektor kelautan di wilayahnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, mencatat jumlah nelayan di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 14.685 jiwa, yang terdiri dari 13.154 nelayan menangkap ikan di Laut, dan 1531 nelayan menangkap ikan di perairan umum (sungai). Jumlah penduduk di 4 Kecamatan Pesisir sebanyak 682.285 Jiwa. Masyarakat nelayan di wilayah pesisir terbanyak berada di kecamatan Pantai Labu berjumlah 4 587 Jiwa (*Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020, 2021*).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berupaya menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, namun upaya yang dilakukan tidak semudah yang diperkirakan, karena kenyataannya ditemui berbagai permasalahan yang dihadapi, baik dari Dinas Perikanan maupun dari nelayan pesisir. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan adalah terbatasnya jumlah anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan dan jumlah pegawai yang belum memadai. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Bapak Zulkifli Lubis, S.Pi menyatakan, bahwa dari hasil pengamatan di lapangan dan interaksi dengan nelayan dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain:

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan karena pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang juga sangat rendah,
- b. Sarana tangkap nelayan yang belum memadai,  
Nelayan masih menggunakan sarana tangkap sederhana yang belum tersentuh teknologi yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas hasil tangkapan. Dan waktu mencari ikan juga akan dipengaruhi oleh cuaca dan musim.
- c. Harga ikan yang tidak stabil,  
Banyak nelayan yang bekerja sebagai buruh tidak memiliki sarana untuk menangkap ikan, sehingga mereka harus menjual hasil tangkapannya dengan harga murah ke Toke.
- d. Pembinaan usaha nelayan belum maksimal,  
Pembinaan pada usaha nelayan masih kurang, baik dalam hal pemasaran yang berkaitan erat dengan produksi, efisiensi, harga dan pendapatan, maupun pada pengolahan hasil tangkapan yang dapat menambah nilai produksi nelayan.
- e. Modal kerja yang terbatas,  
Keterbatasan modal dalam memenuhi perlengkapan sarana menangkap ikan yang memadai seperti sampan dan jaring, sehingga nelayan menggunakan peralatan seadanya.
- f. Peraturan yang mengatur pemanfaatan wilayah pesisir belum dimiliki oleh daerah.

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan laut 0-12 Mil dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Kondisi masyarakat seperti ini menyebabkan lambatnya perkembangan atau kemajuan daerah Deli Serdang. Semua pihak terkait (Dinas/Badan Perangkat Daerah) yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terutama Dinas Perikanan, harus berupaya dan memberikan peran dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat.

Penelitian dari Ramdayanti, Argenti, & Marsingga (2021), bahwa konsekuensi dari penelitian ini adalah tugas instansi pemancing dapat dikatakan besar dengan adanya pelatihan, persiapan, program perlindungan dan pemberian jabatan dan kerangka kerja kepada pemancing di kota Cisaragejaya. Penelitian Windasai, Said, & Hayat (2021), mengemukakan, bahwa terkait dengan tugas pemerintah daerah dalam melibatkan jaringan penangkapan ikan, khususnya menyusun program-program penguatan jaringan penangkapan ikan seperti memperluas SDM, membuat kantor dan kerangka kerja serta mendirikan yayasan pemancing, namun secara lokal



masih terdapat beberapa kendala, misalnya tidak adanya SDM di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, keharusan rencana keuangan, tidak adanya inovasi dan transportasi yang memuaskan. Hal ini membuat penguatan jaringan penangkapan ikan menjadi tidak bisa dibilang ideal. Penelitian Suprajitno (2021), bahwa ada tiga periode penguatan yang signifikan, khususnya tahap permulaan, partisipatif, dan emansipatoris. Namun, ketiga tahap tersebut belum menunjukkan hasil yang ideal.

Melihat dari latar belakang dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun menganalisis secara ilmiah dari peran dan faktor kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu siklus yang panjang, penelitian dimulai dari minat yang ada dalam diri seorang individu dalam memahami kekhasan tertentu yang kemudian pada saat itu, terbentuk menjadi pemikiran, hipotesis, dan gagasan (Nazir, 2009). Untuk mengakui penelitian yang berangkat dari minat tersebut, cara untuk memulainya adalah dengan memilih teknik yang sesuai dengan tujuan akhir suatu penelitian. Teknik eksplorasi untuk situasi ini menjawab isu-isu yang diangkat dalam pemeriksaan (Mudjiyanto, 2018). Untuk menjawab dan menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka penjabaran tugas Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Deli Serdang akan menggunakan strategi pemeriksaan subjektif. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2013), strategi eksplorasi subjektif digunakan untuk melihat keadaan artikel normal, di mana ilmuwan adalah instrumen kunci, metode pengumpulan informasi diakhiri dengan triangulasi, informasi yang didapat umumnya akan menjadi informasi subjektif, pemeriksaan informasi bersifat induktif/subjektif, dan konsekuensi dari eksplorasi subjektif adalah untuk mengetahui kepentingan, memahami keunikan, mengembangkan kekhasan, dan melacak spekulasi (Sugiyono, 2013).

Sumber penelitian dipilih secara *purposive inspecting*. Sumber penelitian bergantung pada pemikiran bahwa saksi pemeriksaan dapat memberikan data yang lengkap tanpa henti dan relevan dengan target eksplorasi. Saksi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yaitu: 1. Sumber kunci: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang; 2. Saksi Utama: Kepala Bidang Perikanan Tangkap; 3. Informan Tambahan: Analis Kebijakan; 4. Nelayan: 8 orang nelayan Kabupaten Deli Serdang.

Sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu, misalnya laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Bungin (2005) menyatakan bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan Teknik analisis data adalah: Wawancara yang dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir. Observasi, dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir. Dokumentasi, Seperti foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan data dalam penelitian (Bungin, 2005).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini



kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari informan terkait dengan peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir.

Menurut Miles & Huberman (1992) terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data yang terjadi secara bersamaan, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang

Penelitian ini fokus pada bagaimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan pesisir yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menangani pembangunan terkait dengan sektor perikanan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima peran pemerintah dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian, yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana Sendiri (Siagian, 2012).

#### a. Stabilisator

Stabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *sta.bi.li.tas* [n] kemantapan; kestabilan; keseimbangan: menciptakan suatu-nasional yg dinamis bukanlah semata-mata tugas pemerintah dan aparatnya, melainkan tugas segenap anggota masyarakat juga. Maka stabilitas dapat disimpulkan sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan (Alvons, 2019).

Menurut Siagian (2012), peran pemerintah sebagai stabilisator adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa (Sondang, 2012). Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Stabilitas sangat berkaitan erat dengan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang stabil akan mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, baik stabilitas di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya (Budiharsono, 2001; Kristiyanti, 2016).

Stabilitas di bidang ekonomi mendorong pergerakan roda perekonomian masyarakat nelayan pesisir berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian secara wajar, rendahnya inflasi, terciptanya kesempatan berusaha yang lebih luas serta terciptanya proses industrialisasi dalam pengelolaan hasil perikanan (Dahuri, 2000; Wantah, 2017).

Beberapa hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi di wilayah pesisir antara lain: 1) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia karena tingkat pendidikan masyarakat nelayan pesisir masih rendah; 2) Rendahnya kemahiran atau keterampilan masyarakat nelayan pesisir dalam pengelolaan hasil perikanan; 3) Penerapan teknologi pada sarana dan prasarana menangkap ikan sangat minim, sehingga nelayan pesisir masih bergantung pada kondisi cuaca, mengakibatkan nelayan tidak dapat menangkap ikan saat cuaca buruk yang berdampak tidak adanya pemasukan; 4) Produktivitas nelayan pesisir yang masih rendah karena tidak memiliki keterampilan atau keahlian lain selain menangkap ikan; 5) Sektor pemasaran hasil perikanan dikuasai oleh segelintir pihak (toke) yang memiliki modal dan kemampuan managerial yang lebih mengakibatkan harga ikan tidak stabil (Kusnadi, 2005; Mulyadi, 2005).

Hal inilah yang menjadi dasar Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan peran dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan program bantuan bersifat stimulan (rangsangan) kepada nelayan berupa sarana dan prasarana menangkap ikan yang dapat menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian nelayan pesisir. Dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang diharapkan masyarakat nelayan pesisir dapat memiliki modal untuk berusaha lebih baik, memiliki daya saing dengan pengusaha perikanan yang memiliki



kekuatan ekonomi lebih baik sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang yang selaras dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas di daerah pesisir.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nelayan, dapat disimpulkan bahwa upaya dan peran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir sudah berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang tidak hanya memberikan program bantuan sarana dan prasarana menangkap ikan saja. Dinas Perikanan juga memberi perhatian dalam peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan dengan memberikan pelatihan seperti keterampilan memperbaiki mesin dan membuat alat tangkap jarang, keterampilan tentang mesin kapal dan perbaikan kapal.

Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah memberikan program-program pelatihan kepada para nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan usaha nelayan dalam menangkap ikan di laut. Manfaat pelatihan yang telah dilaksanakan juga memberikan dampak positif bagi nelayan pesisir seperti berkurangnya biaya operasional karena nelayan telah memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Dalam melaksanakan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan Pemerintah seperti pemerataan bantuan menimbulkan isu-isu negatif yang dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, Dinas Perikanan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dinas Perikanan juga melakukan sosialisasi peraturan tentang syarat penerima bantuan Pemerintah, namun masih banyak masyarakat yang kurang merespon dengan baik. Dari wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa penyusunan perencanaan kegiatan disesuaikan dari anggaran yang tersedia.

Hambatan lain yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat nelayan pesisir terkait berkaitan dengan kegiatan menangkap ikan di laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang telah dilarang dioperasikan serta maraknya kapal-kapal luar daerah yang berukuran besar melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan ikan yang telah ditentukan kerap, sehingga menimbulkan konflik antara nelayan di pesisir.

Sudah ada peraturan yang mengatur kegiatan menangkap ikan di laut, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas, 2020). Namun faktanya masih banyak kegiatan menangkap ikan yang melanggar peraturan ini.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah berusaha mengatasi permasalahan di atas untuk menjaga stabilitas di wilayah pesisir. Namun adanya regulasi yang membatasi kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan pengawasan di laut mengakibatkan usaha yang dilakukan kurang maksimal. Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang hanya bisa melakukan sosialisasi peraturan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah provinsi bila terjadi pelanggaran kegiatan menangkap ikan di laut. Sehingga dapat disimpulkan perlu adanya solusi yang tepat agar permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi dengan cepat dan tuntas. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menambah intensitas pengawasan kegiatan menangkap ikan serta



melakukan penindakan yang tegas kepada pihak yang melanggar sehingga tidak ada konflik antar nelayan, dan nelayan tradisional dapat melakukan penangkapan ikan dengan aman.

#### b. Inovator

Dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang diharapkan memiliki gagasan, metode dan sebagainya yang baru. Ada 3 hal mutlak yang harus diperhatikan serius, yaitu penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja (Fauzi, 2000; Indarti & Wardana, 2013).

Dinas Perikanan harus menjadi contoh cara kerja yang tanggap dan cepat, bekerja dengan efektif dan efisien yang menghasilkan tingkat produktifitas yang tinggi. Dengan Inovasi, aparatur mampu bekerja dengan cepat dan aman, memiliki sistem kerja yang sederhana dan transparan serta memiliki semangat kerja yang didasarkan pada pelayanan. Jika Dinas Perikanan mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara inovasi kepada masyarakat akan dapat diterima dengan lebih mudah ("Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," 2020; Rasyid, 2000).

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembenahan dalam birokrasi internalnya agar dapat melaksanakan perannya dengan lebih baik bagi masyarakat. Disusunnya SOP administrasi Pemerintahan Dinas Perikanan yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sehingga ada standarisasi cara yang harus dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Selain untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, SOP ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan serta membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

Dalam melaksanakan perannya sebagai inovator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, Dinas Perikanan dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat "*problem-solving*" dan "*action-oriented*."

Permasalahan lain yang sering dialami oleh masyarakat nelayan pesisir adalah tidak stabilnya harga ikan. hal ini dikarenakan karena sebagian besar nelayan di Deli Serdang bekerja dengan pengusaha ikan yang disebut *toke*. Di mana hasil yang didapat akan dibeli oleh *toke*. Hasil observasi di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Pantai Labu dan Percut Sei Tuan, serta Tangkahan pribadi atau kelompok di empat kecamatan menunjukkan bahwa sektor pemasaran dikuasai oleh *toke*. Sebagai penampung hasil tangkapan, harga ikan ditetapkan oleh *toke*. Para nelayan akan mendapatkan hasil setelah dipotong biaya operasional ke laut seperti minyak, gas, es dan lain-lain. Jumlah ini akan semakin kecil bila ada kerusakan pada sarana dan prasarana alat menangkap ikan. Padahal harga ikan di pasar cenderung tinggi. Hal ini tentu sangat merugikan nelayan yang telah bersusah payah menangkap ikan.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir jika harga ikan masih tidak stabil dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Perlu dilakukan terobosan baru untuk meningkatkan nilai hasil tangkapan nelayan yang akan berimbas pada meningkatnya pendapatan nelayan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah membantu masyarakat nelayan dalam bentuk sarana dan pemasaran serta pengolahan seperti *cool box* dan timbangan. Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang juga telah melakukan inovasi berupa *diversifikasi* ikan hasil perikanan untuk menambah nilai ekonomis ikan hasil



tangkapan nelayan. Membangun gedung tempat mengolah dan memasarkan hasil olahan. Pelatihan keterampilan pengolahan makanan olahan berbahan dasar ikan juga diberikan, serta memberikan bantuan alat pengolahan ikan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik, khususnya di bidang ekonomi.

Fakta di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Dapat dilihat dari niat berusaha setelah mendapat pelatihan keterampilan juga menjadi masalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir. Nelayan masih nyaman dengan mengandalkan hasil menangkap ikan, menjualnya ke *toke* dan terpenting langsung mendapatkan uang *cash* tanpa harus susah mengolah walau hasilnya akan lebih besar. Banyak ditemukan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan yang tidak dimanfaatkan dengan ada alasan kurang modal, tidak ada waktu karena harus mengurus rumah dan anak serta alasan-alasan lain.

Hal ini sangat disayangkan karena semua program bantuan yang diberikan pemerintah, baik pengadaan pelatihan dan bantuan sarana prasarana pengelolaan menggunakan anggaran. Perlu perhatian dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini agar anggaran yang di berikan tidak menjadi sia-sia.

Dari pendapat-pendapat di sana dapat dijelaskan, bahwa kualitas hasil olahan nelayan Deli Serdang tidak kalah dengan produk olahan pabrik. Namun karena tidak memiliki kemasan dan merek dagang hasil yang diterima belum maksimal. Dalam pemasaran hasil olahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti sertifikat halal, ijin dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Syarat ini sangat penting bagi usaha pangan olahan, karena dapat memberikan kepercayaan masyarakat atas produk-produk yang dihasilkan seperti kebersihan, keamanan bahan-bahan yang terdapat dalam hasil olahan dan ke halalannya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan upaya untuk memberdayakan kelompok pengolahan di pesisir, namun belum maksimal karena adanya batasan kewenangan yang dimiliki. Kerjasama lintas sektoral antar Dinas Perikanan dan Dinas atau instansi lain yang terkait merupakan solusi yang tepat. Bagaimana membuat program dan perencanaan yang saling terkait, sinkron dan berkelanjutan dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang.

### c. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain (Sudarmanto et al., 2020; Vindyandika, 2011). Dalam melaksanakan perannya sebagai modernisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi. Fokus ini tidak hanya diterapkan kepada masyarakat nelayan saja, tetapi juga di lingkungan birokrasi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang sendiri.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, memang modernisasi sarana penangkapan ikan telah dilakukan. Bantuan GPS (*Global Positioning System*) sebagai alat navigasi dan penentuan posisi memudahkan nelayan untuk bergerak ke mana saja untuk mencari ikan tanpa takut tersesat atau melewati batas wilayah penangkapan atau batas Negara. Perairan Kabupaten Deli Serdang berada di WPPRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) 571 yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. WPP 571 merupakan satu dari sebelas wilayah pengelolaan yang meliputi perairan Laut Andaman dan Selat Malaka dan secara administrasi meliputi wilayah Provinsi NAD bagian timur, Riau dan bagian timur Sumatera Utara (Damanik, Lubis, & Astuti, 2016; Hutapea, Alwi, Mardiah, Sari, & Ikhsan, 2021). Tidak adanya pembatas perbatasan yang jelas di laut mengakibatkan kapal nelayan rawan melewati perbatasan. Sudah ada beberapa kasus nelayan Kecamatan Pantai Labu yang ditangkap kapal patroli Diraja Malaysia karena dianggap sudah melewati batas Negara.





*Fish finder* adalah teknologi untuk mendeteksi objek bawah air yang bekerja berdasarkan prinsip suara (akustik). *Fish finder* merupakan Salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan oleh nelayan guna menentukan lokasi penangkapan ikan agar efektif dan efisien. Alat ini sangat membantu nelayan dalam menangkap ikan, nelayan tidak perlu lagi menebak lokasi dengan menurunkan dan menaikkan jaring yang sangat memakan waktu dan tenaga (Shirley, Ty, Takebayashi, Liu, & Gilbert, 2011; Wada, Yasui, Saville, & Hatanaka, 2014).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan peran sebagai modernisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, baik di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang sendiri berupa inovasi pelayanan berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat nelayan dalam pengurusan sesuatu hal berkaitan dengan usahanya, juga dengan program-program bantuan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada nelayan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan pesisir karena lebih memudahkan mereka dalam berusaha baik dalam usaha menangkap ikan di laut, usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang berdampak pada bertambahnya hasil pendapatan nelayan. Permasalahan yang dihadapi adalah kualitas SDM yang masih rendah berkaitan dengan tingkat pendidikan serta sarana komunikasi seperti jaringan internet belum merata mengakibatkan inovasi ini belum dapat maksimal terlaksana. Hambatan lain yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan peran sebagai modernisator adalah keterbatasan anggaran, sehingga bantuan yang diberikan belum bisa maksimal dalam hal kuantitas.

#### **d. Pelopor**

Dalam menjalankan peran sebagai pelopor, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang harus mengambil peran sebagai contoh atau panutan (*role model*) bagi masyarakat. Seperti dalam menerapkan peran pemerintah baik stabilitas, modernisator dan inovator, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang harus menerapkan peran-peran tersebut dalam tubuh Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang terlebih dahulu. Kepeloporan dalam bekerja se produktif mungkin dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil semaksimal mungkin maka akan lebih mudah mengubah pandangan, persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara bekerja masyarakat, yang pada akhirnya program-program yang ditawarkan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan dengan lancar.

Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang harus meningkatkan kompetensi baik dalam pelayanan maupun aparturnya terlebih dahulu. Kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi, penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku, ketaatan kepada peraturan yang berlaku, penerapan objektivitas/tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kepeloporan dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan peran sebagai pelopor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir. Di lingkungan internal, sebagian besar aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak berhubungan perikanan dan kelautan. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Walau masih ada aparatur yang enggan mengikuti pelatihan teknis dengan alasan usia dan mau pensiun.

Fungsi pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada fungsi-fungsi normatif saja, tetapi dituntut peranannya sebagai unsur sumber inisiatif dalam usaha pembaharu dan pendorong pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan menjadi pelopor dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan. Penyelenggaraan dimaksud meliputi kegiatan mengatur, membina dan mendorong maupun dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat terutama partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepeloporan terhadap nelayan dilakukan dengan aktif melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada nelayan. Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang juga aktif melaksanakan



program Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan nelayan yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan kepeloporan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk lebih berperan aktif membantu dan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

#### e. Pelaksana Sendiri

Nelayan pesisir memiliki tingkat perekonomian yang rendah dan masuk dalam kategori masyarakat miskin (Imron, 2003). Kemiskinan ini diakibatkan oleh kondisi masyarakat nelayan yang tidak memiliki pengetahuan. Mereka hanya memiliki satu keahlian saja yakni menangkap ikan dengan cara yang selalu sama dari dulu sampai sekarang (Juliantono & Munandar, 2016). Dengan sarana dan prasarana menangkap ikan yang sederhana dan susah menerima perubahan. Hal ini mengakibatkan nelayan pesisir tidak memiliki daya saing dan nilai jual bagi pihak swasta untuk mengelolanya karena dianggap tidak memiliki prospek yang bagus (Goso & Anwar, 2017). Di sinilah Pemerintah memainkan peranan selaku pelaksana sendiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir (Wahyudin, 2003). Fungsi pemberdayaan ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar dari kemiskinan. Pemerintah harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi diri yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya ke arah yang positif. Dalam terminologi pembangunan, secara praktis diartikan sebagai upaya untuk melibatkan, dan memberikan tanggungjawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan (Muslimin, 2010).

Hakekat dari pemberdayaan adalah pada diri manusia, sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Suharto, 2011).

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan peran sebagai pelaku sendiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir. Dimulai dari tahap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Seperti pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan modal dalam berusaha, program bantuan sarana dan prasarana menangkap ikan yang modern memudahkan nelayan dalam mencari ikan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan nelayan. Program-program Pemerintah lainnya di luar kenelayan seperti kesehatan, sertifikat hak atas tanah nelayan, konversi solar ke LPG mesin perikanan dapat meningkatkan martabat masyarakat nelayan di pesisir. Adanya semangat dan kepercayaan diri ini sangat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan pembinaan dan pendampingan serta program bantuan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah upaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat nelayan pesisir. Dengan bergeraknya roda perekonomian diharapkan tingkat kesejahteraan nelayan akan lebih meningkat.

#### Kendala yang Dihadapi Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang

Dari hasil penelitian, diketahui Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di kabupaten Deli Serdang, namun hasilnya



masih belum optimal. Hal ini karena ada berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perannya, yaitu:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perikanan, baik pelatihan hukum dan pelatihan keterampilan. Dengan alasan melaut sehingga pihak desa mengirimkan orang yang kurang tepat, seperti pada pelatihan membuat jaring *millennium* yang hadir nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing. Bahkan ada peserta yang sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya kembali hadir mengikuti pelatihan yang sama.
2. Kemampuan manajerial/pengelolaan kelompok yang rendah, sehingga banyak kelompok yang sudah mendapatkan bantuan tidak bertahan lama karena adanya ketidakpuasan yang mengakibatkan konflik dan perpecahan dalam kelompok.
3. Kesadaran dan niat berusaha masih sangat rendah, hal ini terlihat dari tidak adanya keseriusan masyarakat nelayan menekuni dan melanjutkan usaha makan olahan berbahan dasar ikan seperti bakso dan nugget, padahal sudah mendapatkan pelatihan dan alat pengolahannya dengan alasan tidak ada modal, tidak ada membantu dan alasan lainnya.
4. Kemampuan anggaran yang dimiliki Dinas Perikanan masih sangat kurang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan nelayan di 4 Kecamatan pesisir. Anggaran Dinas Perikanan harus dibagi untuk tiga bidang, yakni Bidang perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan Bidang Bina Usaha dan pengawasan.
5. Regulasi dan kebijakan yang membatasi ruang gerak Dinas Perikanan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

## SIMPULAN

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaku sendiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum memberikan hasil yang optimal. Kendala - kendala yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang adalah: rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, kemampuan manajerial/pengelolaan kelompok yang rendah, kesadaran dan niat berusaha masih sangat rendah, keterbatasan jumlah, keahlian dan kompetensi aparatur di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam pembinaan dan pendampingan. Kemampuan anggaran yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang masih sangat kurang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan nelayan serta Regulasi dan kebijakan yang membatasi ruang gerak Dinas Perikanan dalam menjalankan perannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2006). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing. Jakarta: Grasindo.
- Alvons, M. (2019). Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 295–307. <https://doi.org/10.54629/ILI.V15I4.252>
- Budiharsono, S. (2001). Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bungin, B. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahuri, R. (2000). Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LISPI).
- Damanik, M. R. S., Lubis, M. R. K., & Astuti, A. J. D. (2016). Kajian Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Geografi, 8(2).
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2020). Retrieved December 10, 2022, from kkp.go.id website: <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/256-tugas-dan-fungsi>



- Fauzi, S. (2000). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir*. Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan. Bogor: Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology.
- Goso, & Anwar, S. M. (2017). Kemiskinan Nelayan Tradisional Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Kumuh. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1). <https://doi.org/10.35906/im001.v3i1.201>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Harmawati, Y. (2018). Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.2372>
- Hasmori, A. A. (2011). Pendidikan, Kurikulum Dan Masyarakat: Satu Integrasi. *Journal of Edupres*, 1(1).
- Hutapea, R. Y., Alwi, I. N., Mardiah, R. S., Sari, R. P., & Ikhsan, S. A. (2021). Studi Pengoperasian Purse Seine di KM. Sumber Abadi. *Aurelia Journal*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.15578/aj.v3i1.10452>
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 63–82. <https://doi.org/10.14203/IMB.V5I1.259>
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir kota Semarang. *BENEFIT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 75–88.
- Juliantono, F. J., & Munandar, A. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1857–1866. Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/180>
- Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020. (2021). Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.
- Kartasasmita, G. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Korniawan, R. (2019). Analisis Wacana Media terhadap Pemberitaan Rencana Kebijakan Pajak e-Commerce. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 86–91. <https://doi.org/10.46937/17201926593>
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Proceeding SENDI\_U*, 1(1). Semarang: Universitas STIKUBANK.
- Kusnadi. (2005). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Transaksi*, 11(1).
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 65. <https://doi.org/10.31445/iskm.2018.220105>
- Mulyadi, S. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muslimin. (2010). *Komunikasi Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/CIVIS.V1I2/IJLL591>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Permen KP Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Pub. L. No. 59, [peraturanpedia.id](http://peraturanpedia.id) (2020). Indonesia: Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1398.
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(2).
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- Rukin, R. (2020). Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.1998>
- Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang. (2022, December 10). Retrieved December 10, 2022, from portal.deliserdangkab.go.id website: <https://portal.deliserdangkab.go.id/>
- Shirley, J. W., Ty, S., Takebayashi, S. -i., Liu, X., & Gilbert, D. M. (2011). FISH Finder: a high-throughput tool for analyzing FISH images. *Bioinformatics*, 27(7), 933–938. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr053>
- Siagian, S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang, S. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, Nur Simarmata, Sukarman, & Syafrizal. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2011). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2012). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357. <https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3610>
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, G. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372>
- Temu Nasional Penerbitan Gazeter Nasional Tahun 2020. (2020, December 22). Retrieved December 10, 2022, from sinar.big.go.id website: <https://sinar.big.go.id/Detail/Berita/Temu-Nasional-Penerbitan-Gazeter-Nasional-Tahun-2020>
- Umar, M. Z., & Jaya, S. N. (2022). Bimbingan Teknis Kewirausahaan pada Masyarakat di Kampung KB Kecamatan Nambo Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 311–318. <https://doi.org/10.52436/1.ipmi.622>
- Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah., Pub. L. No. 23 (2014). Indonesia: LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM.
- Vindyandika. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wada, M., Yasui, S., Saville, R., & Hatanaka, K. (2014). The development of a remote fish finder system for set-net fishery. 2014 Oceans - St. John's, 1–6. Toronto: IEEE. <https://doi.org/10.1109/OCEANS.2014.7003174>
- Wahyudin, Y. (2003). *Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir*. In Makalah Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pusat Diklat Kehutanan. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2522.6965>
- Wantah, E. (2017). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Pendidikan Ekonomi dan Potensi Pesisir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(2), 95–103. <https://doi.org/10.17977/um022v2i22017p095>
- Windsai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(3), 793–803.
- Zebua, Y., Wildani, P. K., Lasefa, A., & Rahmad, R. (2016). Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6923>

